

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan telaah pada bab-bab sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yang dapat dipetik antara lain: *pertama*, mengenai penyebab pendidikan menjadi mahal secara nasional menurut versi *political society* adalah karena tuntutan demokratisasi, desentralisasi, dan perlunya peran masyarakat secara lebih besar. Sementara itu, bagi *civil society* sendiri, penyebab dari pendidikan mahal adalah proses liberalisasi-privatisasi pendidikan yang sedang menggejala, iklim birokratisasi, komersialisasi, dan penggelapan dana pendidikan serta inefisiensi unit biaya pendidikan yang kerap terjadi. Oleh karena itu diperlukan solusi. Solusi dari arus *political society* adalah skenario pentahapan untuk mencapai 20% APBN untuk pendidikan, dan penataan kembali pola akuntansi pendidikan. Sementara itu dari arus *civil society* di antaranya mendesak agar pemerintah menepati janji APBN 20% untuk pendidikan; menginvestigasi dan menjatuhkan sanksi terhadap semua pihak yang melakukan korupsi atas anggaran pendidikan; mendorong sektor usaha untuk mengalokasikan anggaran untuk pendidikan; mendorong manajemen lembaga pendidikan yang terbuka dan melibatkan wali murid dan peserta didik, pemerintah tetap mengeluarkan regulasi yang pro-rakyat atas liberalisasi dan otonomi pendidikan yang tengah berlangsung.

Sementara itu pada kasus pendidikan mahal di DIY, tulisan ini mencermati faktor penyebabnya yang dipaparkan dari arus *political society* adalah karena inefisiensi anggaran sekolah dan alokasi APBD untuk pendidikan belum memenuhi target. Sementara itu dari *civil society* disebabkan tidak ada standarisasi-regulasi dalam menentukan biaya pendidikan daerah, praktek korupsi dan *mark up* anggaran, kecilnya anggaran pendidikan, lemahnya tanggung jawab publik pemerintah, kebutuhan sarana canggih dalam pembelajaran yang tidak digali dari non-wali siswa, *image building* mahalnya sekolah secara citra positif. Selanjutnya tawaran solusi dari *political society* adalah disusunnya

pemerintah provinsi maupun daerah (2006 dan 2007), jaminan pendidikan daerah, dan adanya retrieval serta subsidi pendidikan lainnya. Sedangkan dari civil society dengan kasus Pokja Pendidikan Gratis menandakan perlunya efisiensi dan *cost sharing* antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta tindakan alternatif-jangka pendek berupa keringanan atau subsidi bagi masyarakat miskin.

Temuan dan kesimpulan ini tentu saja dimaksudkan untuk melihat spektrum analisis sebab dan alternatif solusi, baik dalam jangka pendek atau panjang yang dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat yang secara umum dapat dikatakan bahwa arah penanganan dan penyelesaian atas pendidikan mahal masih membutuhkan komitmen dan langkah yang strategis, sistematis dan tepat.

## **B. Saran**

Sebagai bahan tindak lanjut perlu disampaikan beberapa saran. *Pertama*, dari hasil penelitian ini bahwa salah satu penyebab pendidikan mahal adalah karena proses liberalisasi-privatisasi pendidikan maka sudah semestinya pemerintah melakukan regulasi dan proteksi yang kuat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan implementasi amanah konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia terutama masyarakat yang tidak mampu agar dapat melangsungkan pendidikannya dan memperolehnya secara layak dan bermutu. Bukan sebaliknya, membiarkan sebagian masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi hanya melihat kenyataan pendidikan (baca:sekolah) menjadi barang mewah yang tidak dapat mereka sentuh. *Kedua*, kaitannya dengan tema dan fokus penelitian ini, maka ke depan perlu ditindaklanjuti dengan penelitian berikutnya terutama tentang liberalisasi dan privatisasi pendidikan dalam bingkai konstitusi sehingga apa yang dilakukan dewasa ini, termasuk konsep otonomi pendidikan, tetap dalam bingkai tanggung jawab negara dan bukan lepas sama sekali dengan mengingat situasi masyarakat Indonesia yang majemuk termasuk dari sisi